



Kementerian PPN/
Bappenas

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA TAHUN 2025-2029



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
2025



Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Desember 2025



Kementerian PPN/
Bappenas



RENCANA AKSI

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

TAHUN 2025-2029

Sasaran dan Target, serta Program Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029

1.1 Sasaran dan Target Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029

Pelaksanaan RAPPP tahun 2025-2029 merupakan periode pelaksanaan kedua penjabaran dari RIPPP tahun 2022-2041, yang difokuskan untuk pemerataan pembangunan dengan penekanan pada: (1) peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan (2) pengembangan ekonomi berbasis sektor unggulan wilayah. Selain itu, RAPPP tahap kedua ini juga telah selaras dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029. Untuk itu, indikator sasaran percepatan pembangunan Papua terdiri atas gabungan indikator utama di dalam RIPPP 2022-2041 dan indikator sasaran pembangunan wilayah pada RPJMN 2025-2029, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Indikator Sasaran Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025-2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

RAPPP Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan di Wilayah Papua sebagai upaya pemenuhan tujuh belas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tahun 2030 sebagai bagian integral dari RPJPN Tahun 2025–2045 dan RPJMN Tahun 2025–2029. Tujuh belas tujuan dan sasaran SDGs tersebut adalah mewujudkan masyarakat global dan nasional yang: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7)

energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, sasaran dan target dalam rangka percepatan pembangunan Papua tahun 2025–2029 selengkapnya disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Sasaran dan Target dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029

No.	Misi/Indikator	Provinsi											
		Papua		Papua Barat		Papua Selatan		Papua Tengah		Papua Pegunungan		Papua Barat Daya	
		Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029						
1.	Usia harapan hidup (tahun)	69,20	70,54	69,45	70,76	69,20	70,54	69,20	70,54	69,20	70,54	69,45	70,76
2.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (persen)	26,40	22,60	22,60	18,80	21,30	15,50	33,10	23,40	32,30	24,20	27,50	21,70
3.	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	0	1	1	2	0	0	2	6	0	4	2	2
4.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,60–7,62	7,98–8,03	10,56–10,57	11,13–11,15	7,60–7,62	7,98–8,03	7,60–7,62	7,98–8,03	7,60–7,62	7,98–8,03	10,56–10,57	11,13–11,15
5.	Harapan lama sekolah (tahun)	11,41–12,19	11,71–13,09	13,35–13,83	13,54–14,55	11,41–12,19	11,71–13,09	11,41–12,19	11,41–13,09	11,41–12,19	11,41–13,09	13,35–13,83	13,54–14,55
6.	Indeks modal manusia	0,44	0,47	0,47	0,49	0,44	0,47	0,42	0,45	0,43	0,45	0,49	0,52

No.	Misi/Indikator	Provinsi											
		Papua		Papua Barat		Papua Selatan		Papua Tengah		Papua Pegunungan		Papua Barat Daya	
		Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029	Baseline 2025	Target 2029						
7.	Tingkat kemiskinan (persen)	16,00–16,50	12,65–13,65	19,62–20,12	13,76–14,76	16,50–17,00	12,50–13,50	26,50–27,00	15,50–16,50	30,00–31,00	17,50–18,50	17,60–18,00	11,76–12,76
8.	Tingkat pengangguran terbuka (persen)	6,00–6,40	5,48–6,00	3,75–4,06	3,68–4,00	0,84–1,00	0,69–0,84	2,65–3,12	2,00–2,40	1,75–2,10	1,68–2,00	6,30–6,80	5,32–5,92
9.	Realisasi investasi (PMA-PMDN) (Rp triliun)	0,70–0,72	0,93–0,98	2,74–2,79	3,64–3,83	2,12–2,16	2,81–2,96	29,23–29,82	38,84–40,84	0,06–0,07	0,08–0,08	3,42–3,49	4,54–4,76
10.	Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi (persen)	6,40		5,70		5,80		7,70		7,00		5,80	
11.	PDRB per kapita (Rp Juta)	88,00	126,90	120,60	164,00	65,50	91,90	119,50	179,40	19,10	28,60	64,90	89,40
12.	Kontribusi PDRB Provinsi (persen)	0,40	0,40	0,30	0,30	0,20	0,10	0,70	0,80	0,10	0,10	0,20	0,20
13.	Rasio gini	0,380–0,383	0,355–0,359	0,370–0,380	0,331–0,335	0,372	0,367–0,372	0,380–0,383	0,374–0,380	0,337–0,383	0,339–0,343	0,300	0,295–0,300
14.	Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) (persen)	59,28	78,99	1,08	23,09	59,00	78,99	59,28	78,99	59,28	78,99	1,08	23,09

No.	Misi/Indikator	Provinsi											
		Papua		Papua Barat		Papua Selatan		Papua Tengah		Papua Pegunungan		Papua Barat Daya	
		Baseline 2025	Target 2029										
15.	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	82,19	82,83	82,89	83,53	80,63	81,30	82,56	83,20	83,53	84,15	82,89	83,52

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.2 Keselarasan Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025–2029 dengan Prioritas dan Fokus RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029

RPJMN tahun 2025–2029 mengusung delapan misi (Asta Cita), yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional (PN), sebagai

tujuan jangka menengah 2025–2029. Delapan misi (Asta Cita) sebagai Prioritas Nasional tersebut disajikan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2
Delapan Misi (Asta Cita) sebagai Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Lebih lanjut, kedelapan misi (Asta Cita) sebagai Prioritas Nasional tersebut telah selaras dengan prioritas dan fokus RIPPP tahap II tahun 2025–2029 yang mengusung misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta kondisi perlu (Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, Lingkungan Hidup, Tata Kelola Pembangunan, Tanah

Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial).

Keselarasan Asta Cita sebagai Prioritas Nasional pada RPJMN tahun 2025–2029 dengan prioritas dan fokus RIPPP tahap II tahun 2025–2029 disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Keselarasan Asta Cita sebagai Prioritas Nasional pada RPJMN Tahun 2025–2029 dengan Prioritas RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
1.	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Tata Kelola Pembangunan	<p>Pelaksanaan forum dialog pembangunan Papua di tingkat nasional dan internasional</p> <p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berdemokrasi</p> <p>Peningkatan pemahaman politik, hak-hak, dan wawasan kebangsaan</p> <p>Penerapan gerakan revolusi mental untuk membangun karakter masyarakat Papua</p>
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	<p>Penyelenggaraan air minum melalui pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan karakteristik daerah</p> <p>Penyelenggaraan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) melalui sistem pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan karakteristik daerah</p> <p>Peningkatan tata kelola kelembagaan, kapasitas institusi, dan libatkan masyarakat untuk penyediaan akses air minum aman, akses air limbah domestik aman, dan akses persampahan</p> <p>Pemberian edukasi serta peningkatan kesadaran kepada masyarakat terkait air minum dan sanitasi (air limbah domestik dan sanitasi)</p> <p>Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) berbasis potensi sumber daya lokal dan kebutuhan energi serta peningkatan kapasitas SDM untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan</p> <p>Pengembangan <i>renewable energy based industrial development</i> (REBID) dan <i>renewable energy based economic development</i> (REBED)</p> <p>Modernisasi sistem irigasi pertanian dan air baku di kawasan industri dan permukiman</p>

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan
			Pengembangan daerah irigasi melalui pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta pembangunan embung dan bendung untuk mendukung ekonomi lokal
		Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas masyarakat Papua untuk mampu mengelola lingkungan dan dampak yang ditimbulkan
			Digitalisasi sistem informasi pencemaran dan pengrusakan lingkungan
			Pelibatan masyarakat adat dengan kearifan lokal untuk perlindungan kualitas air, air laut, udara, dan tanah serta pengelolaan sampah dan limbah
			Penerapan program ekonomi sirkular melalui prinsip 9R (refuse, rethink, reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recycle, dan recover)
			Penerapan penataan ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan
			Penguatan perlindungan kawasan konservasi perairan
			Penguatan basis data keanekaragaman hayati pesisir dan laut
			Pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan kawasan lindung dan konservasi pesisir dan laut
			Pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan
			Perlindungan pemanfaatan kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil
			Penyuluhan dan pendampingan pengelola hutan pada masyarakat adat
			Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya lahan

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Lingkungan Hidup	Penataan ruang berbasis konservasi
			Perlindungan kawasan ekowisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan
			Pemanfaatan lahan secara berkelanjutan dengan kearifan lokal masyarakat setempat
			Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat asli Papua melalui skema perhutanan sosial
			Perlindungan dan rehabilitasi cagar alam, kawasan konservasi, dan kawasan lindung
			Inventarisasi, perlindungan, dan pelestarian spesies yang dilindungi
			Penentuan prioritas konservasi
			Pembangunan rendah karbon di tingkat daerah pada 5 (lima) sektor prioritas (pengelolaan lahan berkelanjutan, pembangunan energi berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan sampah, serta rendah karbon laut dan pesisir)
		Tata Kelola Pembangunan	Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan terkait pembangunan rendah karbon
			Peningkatan komunikasi sosial dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok strategis
			Peningkatan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua
			Peningkatan dukungan pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
2.	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Tata Kelola Pembangunan	pedalaman, perbatasan negara, pulau-pulau kecil, dan komunitas adat terpencil
			Peningkatan kerukunan hidup masyarakat, kerukunan antarumat, dan kerukunan antargolongan penduduk
			Peningkatan penggunaan pendekatan teritorial
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Papua Produktif	Pengelolaan terpadu UMKM melalui skema kemitraan usaha mikro kecil (UMK) dengan usaha menengah besar (UMB) berbasis komoditas unggulan
			Digitalisasi UMKM untuk perluasan akses pasar, pembiayaan, serta manajemen usaha hingga tingkat kampung
			Pendampingan dan pembentukan koperasi di setiap wilayah adat
			Peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi
			Pembangunan dan penguatan sentra industri kecil dan menengah (IKM) dengan memperhatikan potensi sumber daya lokal dan memprioritaskan Orang Asli Papua (OAP)
			Perluasan konsultasi dan inkubasi bisnis bagi wirausaha pemula
			Peningkatan kapasitas dan kreativitas pengusaha muda Papua
			Penguatan pelatihan kewirausahaan dan dukungan inkubasi usaha dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, khususnya OAP
			Pembukaan dan perluasan akses pasar digital untuk pengembangan wirausaha muda yang produktif dan inovatif
			Perluasan skema permodalan bagi wirausaha

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	<p>Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan Trans Papua serta perbatasan</p> <p>Pembangunan jalan trans pulau tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)</p> <p>Pembangunan jalan akses simpul transportasi (pelabuhan, bandara, dan terminal)</p> <p>Pembangunan dan peningkatan terminal penumpang dan barang antarnegara, hub antarmoda, serta penyediaan layanan angkutan umum di perkotaan dan kawasan perbatasan</p> <p>Pembangunan dan peningkatan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan terutama di wilayah kepulauan</p> <p>Penyediaan armada penyeberangan terjadwal yang aman</p> <p>Penyediaan layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara</p> <p>Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan penyeberangan</p> <p>Perluasan jangkauan BBM dengan harga terjangkau</p> <p>Pembangunan dan peningkatan pelabuhan untuk memperlancar distribusi barang yang menjangkau daerah pedalaman, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut, serta mendukung pengembangan ekonomi berorientasi ekspor</p> <p>Penyelenggaraan layanan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut, terintegrasi dengan gerai maritim dan tol laut serta jembatan udara</p> <p>Penyediaan angkutan barang dan penumpang yang terjadwal, terutama untuk distribusi logistik yang aman</p> <p>Penguatan mekanisme distribusi logistik</p>

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
3.	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	<p>Penyediaan fasilitas navigasi dan keselamatan pelayaran</p> <p>Pembangunan bandara perairan (<i>waterbased airport</i>) untuk mendukung destinasi pariwisata</p> <p>Pembangunan dan peningkatan bandar udara pengumpul dan pengumpan/<i>airstrip</i></p> <p>Peningkatan kualitas bandar udara perintis yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan</p> <p>Penyediaan rute subsidi angkutan udara yang menjangkau daerah pedalaman</p> <p>Pembangunan dan peningkatan bandara hub internasional dan penyediaan rute internasional</p> <p>Penciptaan permintaan (<i>demand</i>) atas layanan telekomunikasi</p> <p>Peningkatan kualitas infrastruktur TIK yang sudah terbangun serta perluasan infrastruktur hingga kampung</p> <p>Perluasan layanan digital kesehatan, pendidikan, dan informasi publik</p> <p>Pengembangan literasi dan keahlian TIK</p> <p>Peningkatan produktivitas sektor ekonomi dengan pemanfaatan TIK (digitalisasi sektor ekonomi)</p> <p>Perluasan dan peningkatan sistem tenaga listrik</p> <p>Pengembangan <i>smart mini/micro grid</i></p> <p>Perluasan pelayanan tenaga listrik</p> <p>Penyusunan dan pemutakhiran dokumen rencana umum energi daerah (RUED) dan rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD)</p>

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Papua Sehat	<p>Peningkatan cakupan dan kualitas persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan serta pelayanan antenatal, neonatal, dan pascapersalinan dengan tenaga kesehatan terlatih</p> <p>Penguatan sistem rujukan maternal dan pendampingan ibu hamil dan balita komplikasi</p> <p>Peningkatan jumlah dan kapasitas Puskesmas mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) dan RS mampu pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK)</p> <p>Penyediaan tempat tunggu untuk kelahiran dan perawatan balita komplikasi</p> <p>Perluasan cakupan imunisasi dasar lengkap</p> <p>Penjaminan ketersediaan obat dan kebutuhan sediaan darah setiap saat</p> <p>Penguatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan KB</p> <p>Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB pascapersalinan (KBPP) dan pencegahan kehamilan resiko tinggi (4 terlalu)</p> <p>Penyediaan posyandu aktif, terutama pelayanan ibu dan anak di setiap kampung</p> <p>Penguatan koordinasi lintas sektor untuk integrasi intervensi sensitif seperti akses air minum dan sanitasi, jaminan sosial, serta penyediaan pangan bergizi yang mengutamakan protein hewani</p> <p>Penguatan pendidikan gizi melalui pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga</p> <p>Penguatan pelayanan gizi spesifik di Puskesmas untuk percepatan penurunan <i>stunting</i></p>

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Papua Sehat	<p>Pemenuhan ketersediaan obat program gizi dan suplementasi pada ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurus serta pemanfaatan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga</p> <p>Intensifikasi promosi kesehatan melalui edukasi masyarakat dengan prinsip kontekstual budaya Papua</p> <p>Peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan meningkatkan pelibatan sektor nonpemerintah</p> <p>Peningkatan penemuan kasus melalui perluasan cakupan deteksi dini dan penemuan kasus secara aktif maupun pasif</p> <p>Peningkatan penanganan kasus melalui pemberian terapi segera terhadap setiap kasus yang ditemukan dan melakukan pemantauan pengobatan</p> <p>Pengendalian vektor penyakit menular di Papua seperti malaria, filariasis, demam berdarah, HIV/AIDS, dan penyakit menular lainnya</p> <p>Penguatan surveilans terpadu berbasis laboratorium secara <i>real time</i></p> <p>Penyediaan tenaga kesehatan Orang Asli Papua (OAP) untuk surveilans kontekstual Papua</p> <p>Penyusunan rencana pengembangan dan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan secara terintegrasi</p> <p>Penguatan sistem rujukan dan berbasis kompetensi dan pengembangan layanan unggulan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>Percepatan akreditasi dan pemenuhan sarana dan prasarana dan alat kesehatan sesuai standar pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai rencana pengembangannya</p>

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Papua Sehat	<p>Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan <i>telemedicine</i> dan pembangunan Puskesmas di kecamatan tanpa Puskesmas</p> <p>Perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bergerak termasuk <i>flying healthcare</i> (FHC) dan pelayanan kaki telanjang di daerah sulit akses</p> <p>Peningkatan ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui penerapan standar pelayanan kefarmasian dan sistem logistik elektronik</p> <p>Pengembangan layanan unggulan di RS berbasis kondisi epidemiologis dan kebutuhan masyarakat</p> <p>Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bersinergi dengan program lain yang mendukung/melengkapi manfaat JKN</p> <p>Penguatan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan</p> <p>Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan secara merata melalui afirmasi pendayagunaan lulusan tenaga kesehatan terutama untuk Orang Asli Papua (OAP) dalam bentuk ikatan dinas, penugasan khusus, dan program lainnya</p> <p>Penyediaan jaminan tempat tinggal dan keamanan bagi tenaga kesehatan di daerah/lokasi sulit</p> <p>Perluasan cakupan beasiswa untuk pendidikan tenaga kesehatan bagi Orang Asli Papua (OAP) disertai dengan penempatan wajib pasca kelulusan secara merata</p> <p>Peningkatan kualitas tenaga kesehatan prioritas melalui pendidikan dan pelatihan</p>

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Papua Sehat	Pengembangan skema insentif dan penghargaan bagi tenaga kesehatan yang berbasis beban kerja dan kondisi geografis lokasi penugasan
			Peningkatan kesadaran masyarakat yang inovatif melalui pendekatan lokal, disesuaikan dengan budaya, norma, serta kebutuhan masyarakat
			Peningkatan ketersediaan sarana publik dan lingkungan yang sehat sebagai pendorong aktivitas fisik dan kualitas lingkungan
			Penguatan implementasi regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Peningkatan partisipasi tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda dan organisasi masyarakat, swasta, dan mitra potensial serta forum/jejaringnya
			Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) 5 pilar (stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengolahan air minum dan pangan di rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga)
			Peningkatan kualitas perencanaan berbasis data rutin yang valid dan reliabel serta berbasis individu
			Pemenuhan anggaran kesehatan dengan prioritas pada upaya promotif & preventif
		Papua Cerdas	Pemberian dukungan pembiayaan penyediaan layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh pihak nonpemerintah termasuk dukungan pelayanan oleh organisasi keagamaan
			Percepatan peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat
			Penguatan tata kelola peningkatan budaya dan prestasi olahraga

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Papua Cerdas	<p>Peningkatan kualitas pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi</p> <p>Penguatan pembelajaran berbasis penguasaan keterampilan abad 21</p> <p>Pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas merata</p> <p>Pengembangan pendidikan tinggi berkualitas dan berdaya saing global</p> <p>Penyediaan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar (dikdas), dan pendidikan menengah (dikmen) berkualitas dan merata di Papua</p> <p>Pemerataan memperoleh pendidikan tinggi berkualitas terutama untuk bidang-bidang yang menunjang pembangunan Papua</p> <p>Peningkatan budaya belajar untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat</p> <p>Peningkatan penyelenggaraan pendidikan keterampilan, kecakapan hidup, dan literasi dengan fokus pada kelompok usia prioritas, OAP, dan perempuan</p> <p>Pemenuhan tenaga pendidik dan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang diprioritaskan untuk OAP</p> <p>Peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik</p> <p>Pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen iptek dan inovasi serta pusat keunggulan</p> <p>Hilirisasi hasil riset dan inovasi kebudayaan, antropologi, keanekaragaman hayati, dan komoditas unggulan</p> <p>Pemenuhan dan peningkatan pemanfaatan anggaran pendidikan</p>

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
4.	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Papua Cerdas	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis asesmen dan sistem akuntabilitas, terutama dalam mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan
			Peningkatan budaya mutu baik pada satuan pendidikan, Pemerintah Daerah, dan kementerian/lembaga pengampu pendidikan
		Papua Produktif	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
			Pemenuhan kebutuhan pendidikan dan instruktur vokasi berkualitas
			Penguatan cakupan dan distribusi pendidikan, kompetensi, dan keahlian, terutama bagi OAP
			Pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan keahlian dan keterampilan tenaga kerja (balai latihan kerja)
		Tata Kelola Pembangunan	Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG)
			Peningkatan pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan, khususnya bagi perempuan asli Papua
			Penguatan perlindungan perempuan dari kekerasan
			Penguatan pemenuhan hak anak
			Penurunan kekerasan terhadap anak
			Pengembangan kewirausahaan pemuda
			Peningkatan partisipasi dan kepemimpinan pemuda
5.	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Papua Produktif	Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah
			Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
	untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Papua Produktif	<p>Pemenuhan kebutuhan rencana tata ruang melalui fasilitasi penyusunan/revisi rencana tata ruang</p> <p>Peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi persetujuan/rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang</p>
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Papua Produktif	<p>Peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan daerah</p> <p>Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah</p> <p>Peningkatan diversifikasi produk berbasis komoditas unggulan daerah</p> <p>Peningkatan sistem pendukung rantai pasok pengolahan komoditas unggulan daerah</p> <p>Penguatan dan percepatan verifikasi dan validasi data terpadu untuk membantu dan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan perlindungan sosial</p> <p>Penyediaan sarana dan prasarana dan fasilitas yang aksesibel bagi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya</p> <p>Pemberian kesempatan dan proporsi yang adil dan setara di bidang sosial, ekonomi, kesehatan, politik, serta budaya</p> <p>Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) melalui kolaborasi lintas sektor</p> <p>Perluasan layanan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan</p>
		Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau sesuai karakteristik budaya

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
6.	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan dan permukiman
		Tata Kelola Pembangunan	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan Peningkatan jangkauan pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat kampung
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Tata Kelola Pembangunan	Pemenuhan kesiapan Pemerintah Daerah Pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan efisien Penerapan afirmasi khusus untuk ASN/TNI/Polri dan sekolah kedinasan Pengembangan kompetensi dan kinerja ASN berbasis pendidikan dan pelatihan Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Peningkatan kapasitas pemerintahan kampung Penguatan dan pemberdayaan pemerintah distrik sebagai pusat pelayanan, pusat inovasi, dan pusat informasi Percepatan penetapan peraturan daerah turunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Penguatan mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus dan sumber dana lainnya untuk pembangunan di Papua

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
7.	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyaludungan	Tata Kelola Pembangunan	<p>Peningkatan kesadaran hukum, HAM, dan antikorupsi di masyarakat Papua</p> <p>Peningkatan diseminasi informasi pembangunan Papua</p> <p>Peningkatan kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik</p> <p>Penguatan pengelolaan informasi dan penyelenggaraan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)</p> <p>Penguatan <i>Open Government Indonesia</i> (OGI) di Papua</p> <p>Peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses koreksi dan evaluasi pelayanan publik</p>
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Lingkungan Hidup	<p>Penguatan data, informasi, dan literasi bencana</p> <p>Penyiapan budaya sadar dan tanggap bencana</p> <p>Pembangunan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) kebencanaan</p> <p>Penyediaan infrastruktur tanggap bencana melalui pembangunan pengendali banjir di daerah rawan bencana, pembangunan tanggul pemecah gelombang untuk pencegahan abrasi, serta revitalisasi sungai dan danau</p> <p>Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana</p> <p>Penanganan darurat bencana</p> <p>Pelaksanaan aksi ketahanan iklim di lokasi prioritas pada 4 (empat) sektor prioritas (kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan) melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan pendanaan</p>

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Lingkungan Hidup	Pengembangan dan implementasi sistem peringatan dini serta sistem siaga dan tanggap bencana akibat perubahan iklim
			Revitalisasi peran, fungsi, dan tugas Majelis Rakyat Papua
			Penguatan kebijakan/regulasi terkait pengakuan dan perlindungan hukum atas masyarakat adat
			Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat
		Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Pemberdayaan masyarakat adat dalam pembangunan
			Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang meliputi tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat
			Penguatan kebijakan/regulasi kepemilikan dan pemanfaatan tanah adat/ulayat, perairan, dan hutan adat
			Perlindungan nilai budaya, tradisi, adat istiadat, bahasa daerah, dan cagar budaya untuk memperkuat karakter, jati diri, dan identitas masyarakat Papua
			Pengembangan dan pemanfaatan khazanah budaya Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua
			Penguatan tata kelola pembangunan kebudayaan Papua
			Penguatan spirit dan etos kerja SDM berbasis kebudayaan
			Peningkatan kerja sama dan promosi budaya di Pasifik
			Penguatan nilai-nilai toleransi dan moderasi antarumat beragama
			Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan

No.	Asta Cita sebagai Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	RIPPP Tahap II Tahun 2025–2029	
		Misi Utama dan Kondisi Perlu	Prioritas
8.	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Tanah Adat/Ulayat, Kebudayaan, dan Harmoni Sosial	Penguatan lembaga agama dan keagamaan, serta forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong

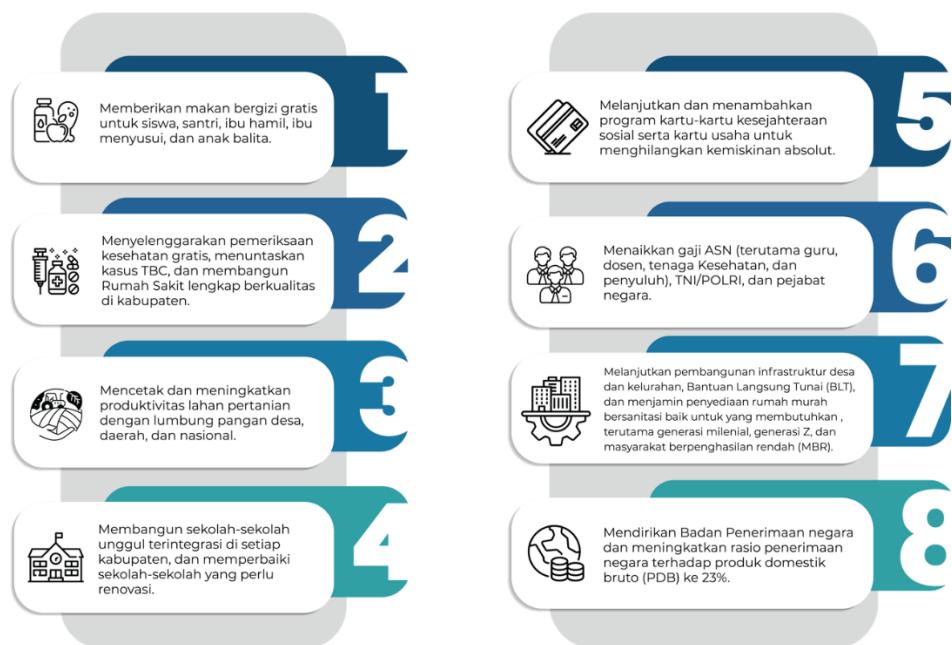
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024) dan Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang RIPPP 2022–2041

1.3 Keselarasan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pada RPJMN Tahun 2025–2029 dengan RAPPP Tahun 2025–2029

RPJMN Tahun 2025–2029 menekankan pada trisula pembangunan, yaitu pertumbuhan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan sumber daya manusia berkualitas. Untuk membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan, disusun Program Hasil

Terbaik Cepat (PHTC) yang mampu menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur. Terdapat delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pada RPJMN Tahun 2025–2029 sebagaimana disajikan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pada RPJMN Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Lebih lanjut, kedelapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) tersebut telah diselaraskan dan

diinternalisasikan dengan muatan program percepatan pada RAPPP tahun 2025–2029.

1.4 Program Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2025–2029

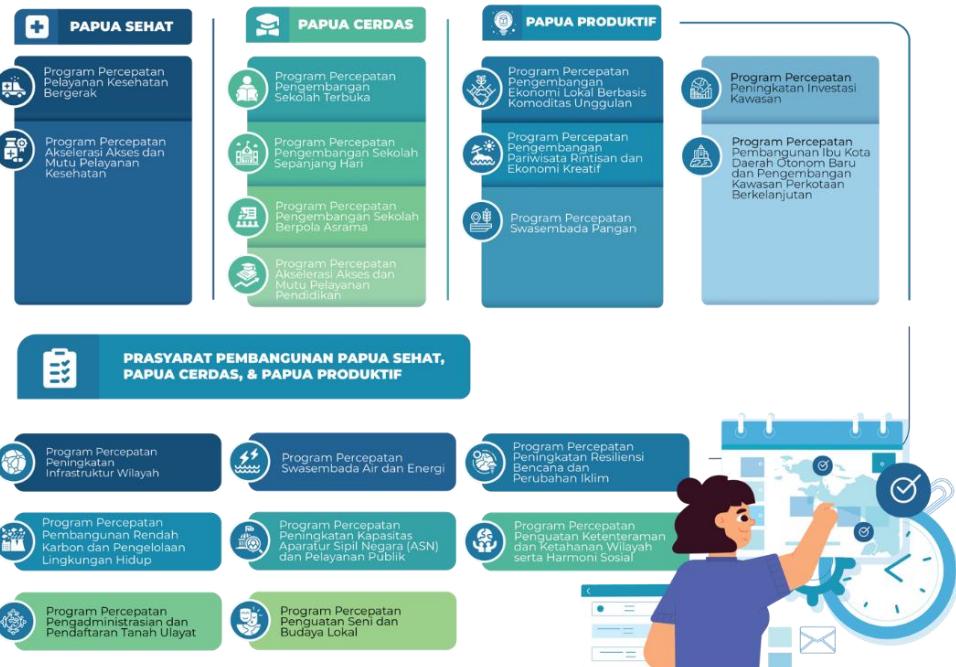
Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan pada misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.1, telah disusun 19 (sembilan belas) program percepatan pembangunan Papua tahun 2025–2029 yang juga mendukung Asta Cita (Prioritas Nasional) dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pada RPJMN Tahun 2025–2029.

Salah satu aspek yang menjadi batas dalam pelaksanaan pembangunan adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup merupakan batas kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia, makhluk hidup, dan keseimbangan antara keduanya melalui ketersediaan sumber daya alam. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah batasan kemampuan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya, seperti limbah.

Batasan pembangunan tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut untuk pada akhirnya dipertimbangkan dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka memastikan kesinambungan antara pembangunan ekonomi dan lingkungan. Beberapa hal yang menjadi batasan pembangunan dari aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah kawasan lindung di darat dan perairan, tutupan hutan primer dan hutan di atas lahan gambut, habitat spesies kunci, luas permukiman di area pesisir terdampak perubahan iklim, kawasan rawan bencana, ketersediaan air, serta ketersediaan energi.

Program percepatan pembangunan Papua pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.4, sementara matriks rincian program dan kegiatan untuk setiap program percepatan disajikan pada Lampiran II tentang Matriks Indikasi Program dan Kegiatan Pembangunan Lingkup Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Papua Tahun 2025–2029.

Gambar 1.4
Program Percepatan Pembangunan Papua pada RAPPP Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.1 Program Percepatan Misi Papua Sehat

Program percepatan misi Papua Sehat pada RAPPP tahun 2025–2029 terdiri dari: (1) Program Percepatan Pelayanan Kesehatan Bergerak; dan (2) Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan. Kedua program tersebut

mendukung PHTC 1, PHTC 2, PHTC 5, dan PHTC 7 yang menekankan pada penurunan prevalensi *stunting*, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta peningkatan akses pada hunian layak dan berkelanjutan.

1.4.1.1 Program Percepatan Pelayanan Kesehatan Bergerak

Program Percepatan Pelayanan Kesehatan Bergerak merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang merata di seluruh Wilayah Papua; (2)

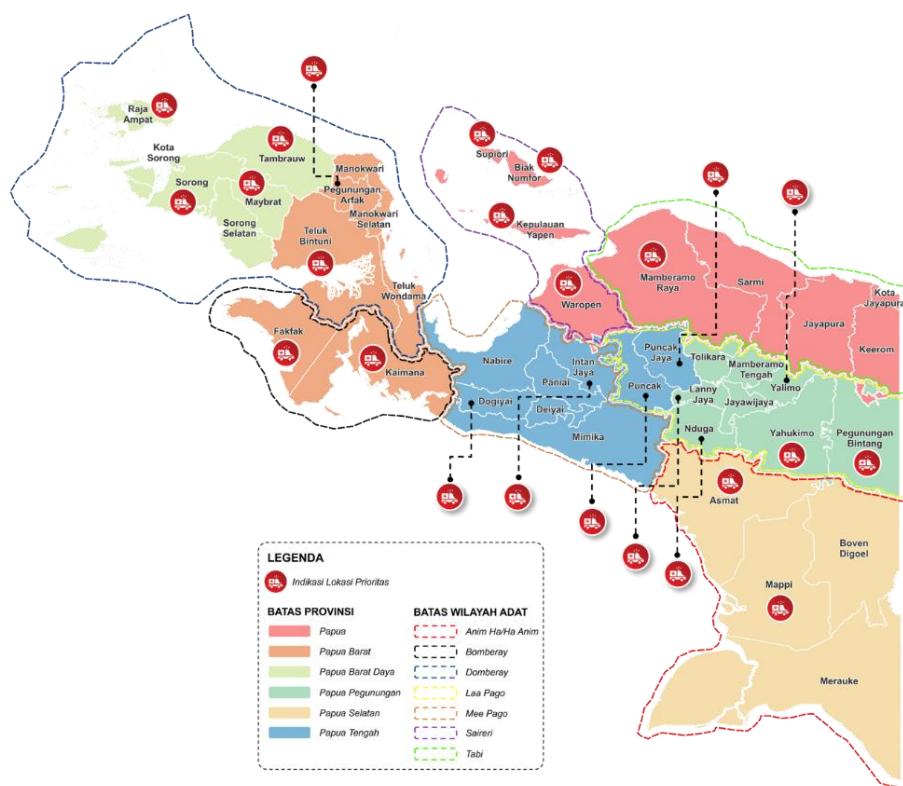
kurangnya ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, serta obat dan alat kesehatan; dan (3) sulitnya mengakses fasilitas kesehatan.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) penyediaan moda transportasi sesuai kondisi geografis wilayah (dataran, pegunungan, rawa, pesisir, dan kepulauan) pada daerah yang sulit akses dan tidak memiliki fasilitas kesehatan dasar dan rujukan; (2) penugasan tenaga kesehatan pada pelayanan kesehatan bergerak; (3) penyediaan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan bergerak; dan (4) pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan

kesejahteraan untuk tenaga pelayanan kesehatan bergerak.

Program ini akan berfokus pada peningkatan umur harapan hidup pada daerah yang memiliki tingkat aksesibilitas ke fasilitas kesehatan yang relatif rendah di Wilayah Papua. Pelayanan yang diberikan mencakup pelayanan promotif, preventif, dan kuratif. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Pelayanan Kesehatan Bergerak pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Pelayanan Kesehatan Bergerak Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.1.2 Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

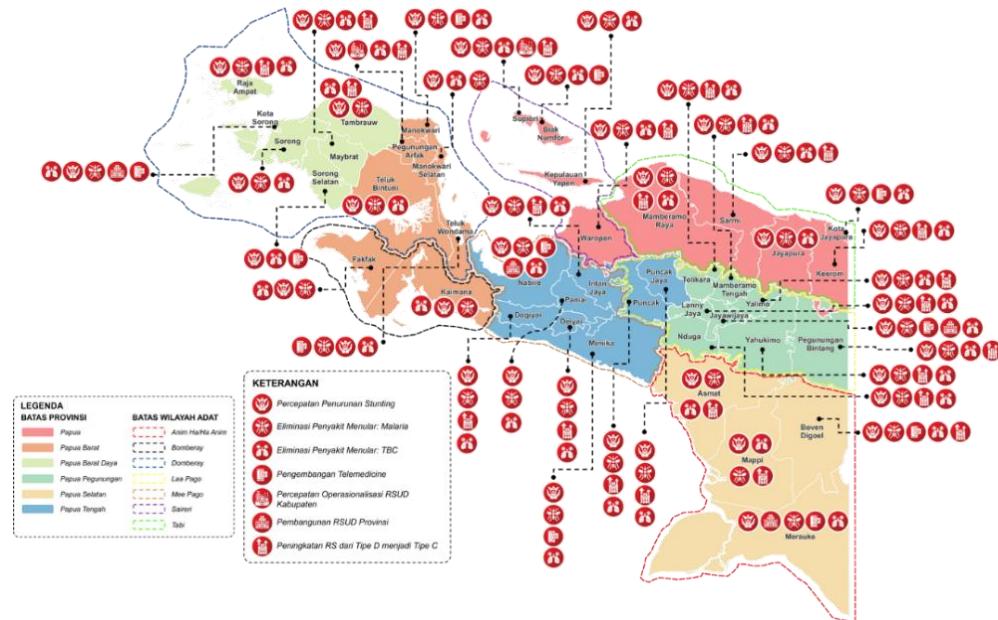
Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) belum terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang merata di seluruh Wilayah Papua; (2) kurangnya ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan, serta obat dan alat kesehatan; (3) sulitnya mengakses fasilitas kesehatan; dan (4) masih tingginya penyebaran penyakit menular.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan sesuai standar; (2) pemenuhan sarana, prasarana, obat, dan alat kesehatan; (3) pendayagunaan

dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan; (4) peningkatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita, usia sekolah, usia produktif, dan usia lanjut; (5) peningkatan jangkauan jaminan kesehatan nasional (JKN); (6) percepatan penurunan *stunting*; (7) pencegahan dan pengendalian penyakit menular (malaria, kusta, frambusia, kecacingan, filariasis, HIV/AIDS, TBC, dan lain-lain); (8) pemberian makanan yang bergizi seimbang terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita; dan (9) peningkatan layanan telemedisin. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.6.

Gambar 1.6

Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

*Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Wilayah Papua

1.4.2 Program Percepatan Misi Papua Cerdas

Program percepatan Papua Cerdas pada RAPPP tahun 2025–2029 terdiri dari: (1) Program Percepatan Pengembangan Sekolah Terbuka; (2) Program Percepatan Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari; (3) Program Percepatan Pengembangan Sekolah Berpola Asrama; dan (4) Program Percepatan

Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan. Keempat program tersebut mendukung PHTC 1 dan PHTC 4 yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik.

1.4.2.1 Program Percepatan Pengembangan Sekolah Terbuka

Program Percepatan Pengembangan Sekolah Terbuka merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) belum terpenuhinya jumlah tenaga pendidik yang merata di seluruh Wilayah Papua; (2)

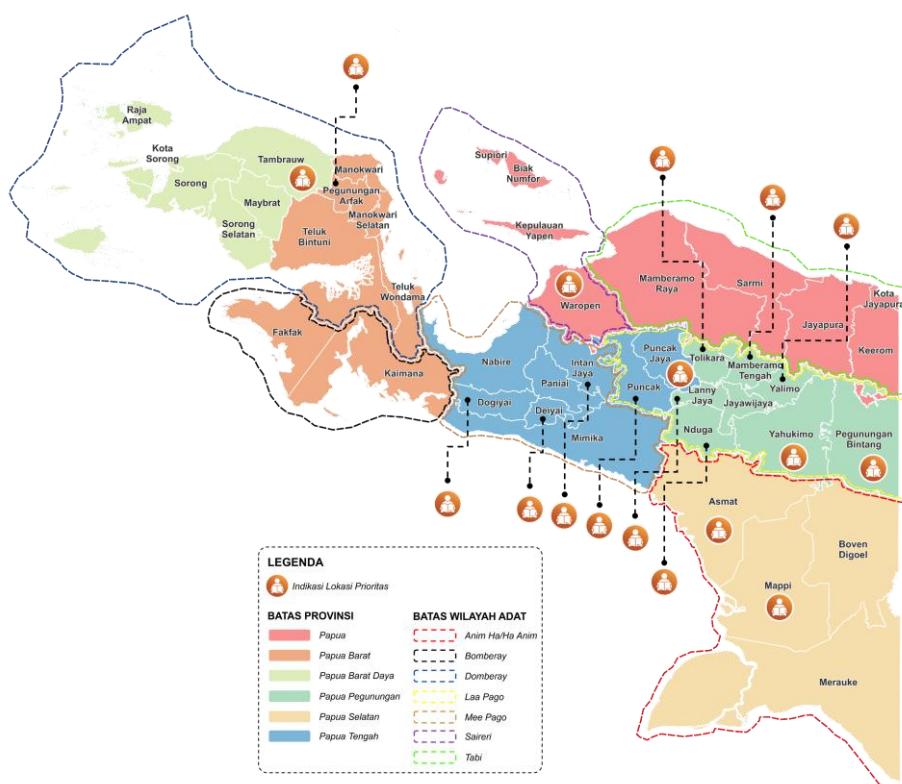
kurangnya ketersediaan fasilitas, serta sarana dan prasarana pendidikan; dan (3) sulitnya mengakses fasilitas pendidikan. Program ini utamanya ditujukan untuk menyasar anak usia sekolah dasar (7–12 tahun) yang berada

di daerah sulit akses dan tidak dapat menjangkau fasilitas pendidikan dasar terdekat. Oleh sebab itu, dibentuk sekolah terbuka yang merupakan cabang dari sekolah induk terdekat, dengan sistem pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan kontekstual wilayah, misalnya pembelajaran di alam.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) pemenuhan tenaga pendidik yang diprioritaskan berasal dari masyarakat lokal; (2) penyusunan kurikulum yang disesuaikan

dengan kontekstual wilayah setempat;(3) pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik; (4) penyusunan regulasi dari pemerintah terkait penyelenggaraan sekolah terbuka; dan (5) pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Pengembangan Sekolah Terbuka pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.7.

Gambar 1.7
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Pengembangan Sekolah Terbuka Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

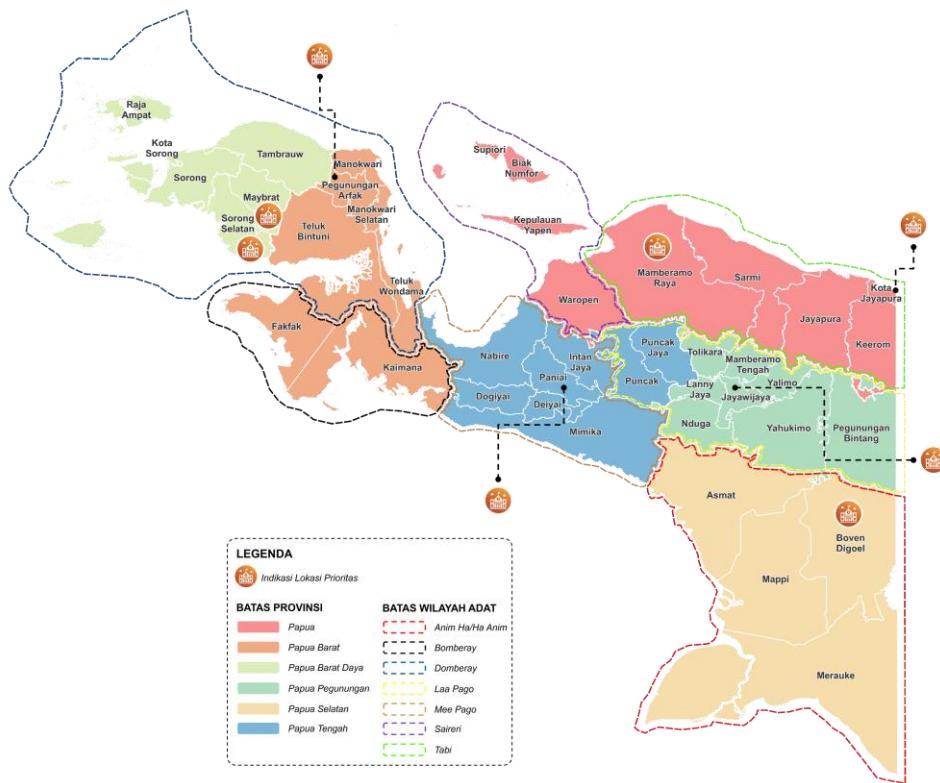
1.4.2.2 Program Percepatan Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari

Program Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) kurangnya ketersediaan fasilitas, serta sarana dan prasarana pendidikan; dan (2) rendahnya literasi dan numerasi siswa akibat minimnya ketersediaan makanan bergizi seimbang di wilayah setempat untuk mendukung daya tangkap siswa, serta banyaknya anak pada usia sekolah yang tidak bersekolah karena membantu orang tua atau aktivitas lainnya. Program ini utamanya ditujukan untuk menasarkan anak usia sekolah dasar (7–12 tahun) yang mengalami putus sekolah atau tidak sekolah. Sekolah sepanjang hari adalah suatu proses belajar mengajar yang dilaksanakan sehari penuh (8 sampai 9 jam) mulai pagi hingga sore hari dengan menerapkan kurikulum dan aktivitas yang terintegrasi. Pada sekolah sepanjang hari, seluruh aktivitas peserta didik dilakukan di sekolah, mulai dari belajar, makan, bermain,

hingga ibadah dengan tujuan mengembangkan seluruh potensi dan kepribadian siswa.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik; (2) penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kontekstual wilayah setempat; (3) pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik; (4) penyusunan regulasi dari pemerintah terkait penyelenggaraan sekolah sepanjang hari; (5) penyediaan makanan bergizi seimbang bagi peserta didik; (6) penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendukung fasilitas pendidikan untuk menunjang sekolah sepanjang hari; dan (7) pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.8.

Gambar 1.8
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
Pengembangan Sekolah Sepanjang Hari Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.2.3 Program Percepatan Pengembangan Sekolah Berpola Asrama

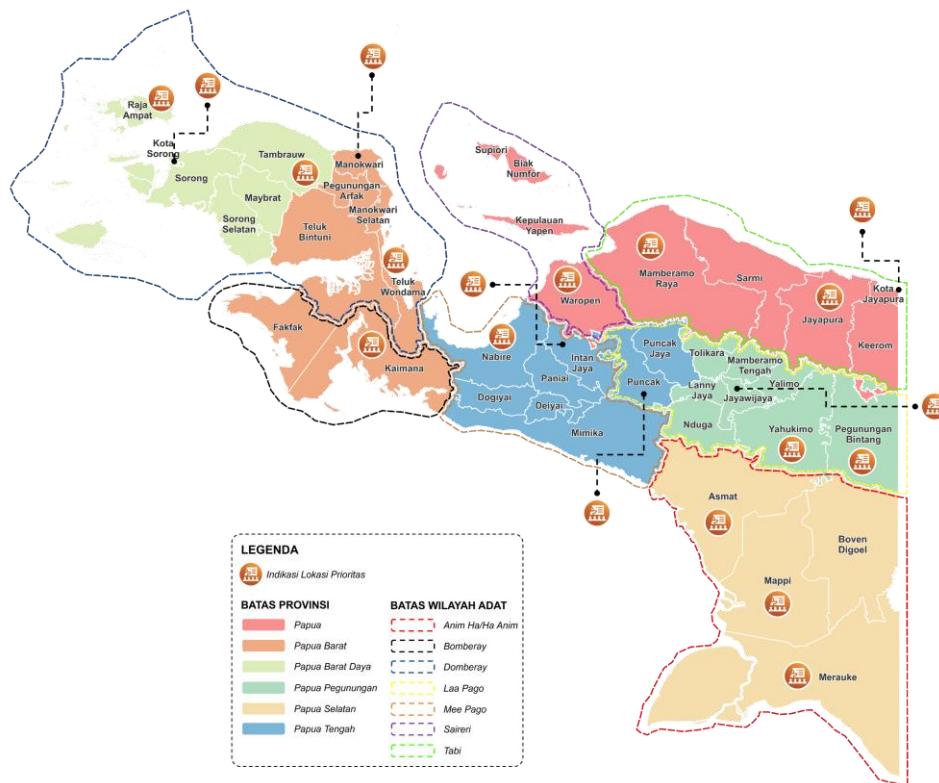
Program Percepatan Pengembangan Sekolah Berpola Asrama merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) kurangnya ketersediaan fasilitas, serta sarana dan prasarana pendidikan; dan (2) sulitnya mengakses fasilitas pendidikan, salah satunya diakibatkan minimnya sarana dan prasarana transportasi antarkampung dan antarwilayah. Program ini utamanya ditujukan untuk menyasar anak usia sekolah menengah atas (16–18 tahun). Sekolah berpola asrama

adalah institusi pendidikan yang menerapkan konsep para peserta didik bertempat tinggal dalam jangka waktu tertentu serta relatif tetap bersama dengan guru dan pamong sebagai wali asrama. Sekolah berpola asrama bertujuan untuk meningkatkan karakter, bakat, dan minat siswa melalui proses penghayatan dan pengembangan nilai budaya.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) pemenuhan dan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; (2) penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kontekstual wilayah setempat; (3) pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik; (4) penyusunan regulasi dari pemerintah terkait penyelenggaraan sekolah berpola asrama; (5) penyediaan makanan

bergizi seimbang bagi peserta didik; (6) penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendukung fasilitas pendidikan untuk menunjang sekolah berpola asrama; dan (7) pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Pengembangan Sekolah Berpola Asrama pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.9.

Gambar 1.9
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Pengembangan Sekolah Berpola Asrama Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

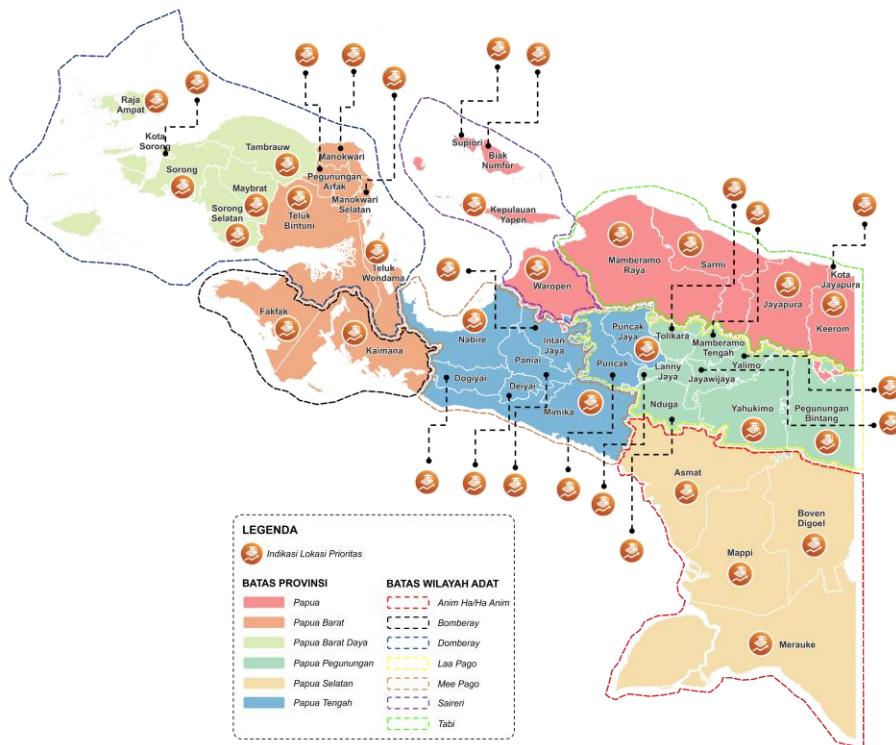
1.4.2.4 Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan

Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) belum terpenuhinya jumlah tenaga pendidik yang merata di seluruh wilayah Papua; (2) belum baiknya kualitas tenaga pendidik dalam memberikan pelayanan pendidikan; (3) rendahnya literasi dan numerasi siswa; (4) belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; (5) kurangnya ketersediaan fasilitas, serta sarana dan prasarana pendidikan; dan (6) sulitnya mengakses fasilitas pendidikan.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) pemenuhan dan peningkatan mutu

tenaga pendidik; (2) penyusunan kurikulum yang disesuaikan dengan kontekstual wilayah setempat; (3) pemberian insentif, jaminan keamanan, dan jaminan kesejahteraan untuk tenaga pendidik; (4) pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan sesuai standar; (5) pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran; (6) pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik; 7) peningkatan akses pendidikan tinggi berkualitas; dan (8) penguatan pendidikan menengah dan tinggi vokasi. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.10.

Gambar 1.10
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
Akselerasi Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

*Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Wilayah Papua

1.4.3 Program Percepatan Misi Papua Produktif

Program percepatan Papua Produktif pada RAPPP tahun 2025–2029 terdiri dari: (1) Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan; (2) Program Percepatan Pengembangan Pariwisata Rintisan dan Ekonomi Kreatif; (3) Program Percepatan Swasembada Pangan; (4) Program Percepatan Investasi Kawasan; dan (5) Program Percepatan Pembangunan Ibu Kota

Daerah Otonom Baru dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berkelanjutan. Kelima program tersebut mendukung PHTC, khususnya PHTC 3 dan PHTC 7 yang menekankan pada pengembangan kawasan sentra produksi pangan dan pangan lokal, pengembangan ekonomi lokal dan hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan pariwisata, serta pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan.

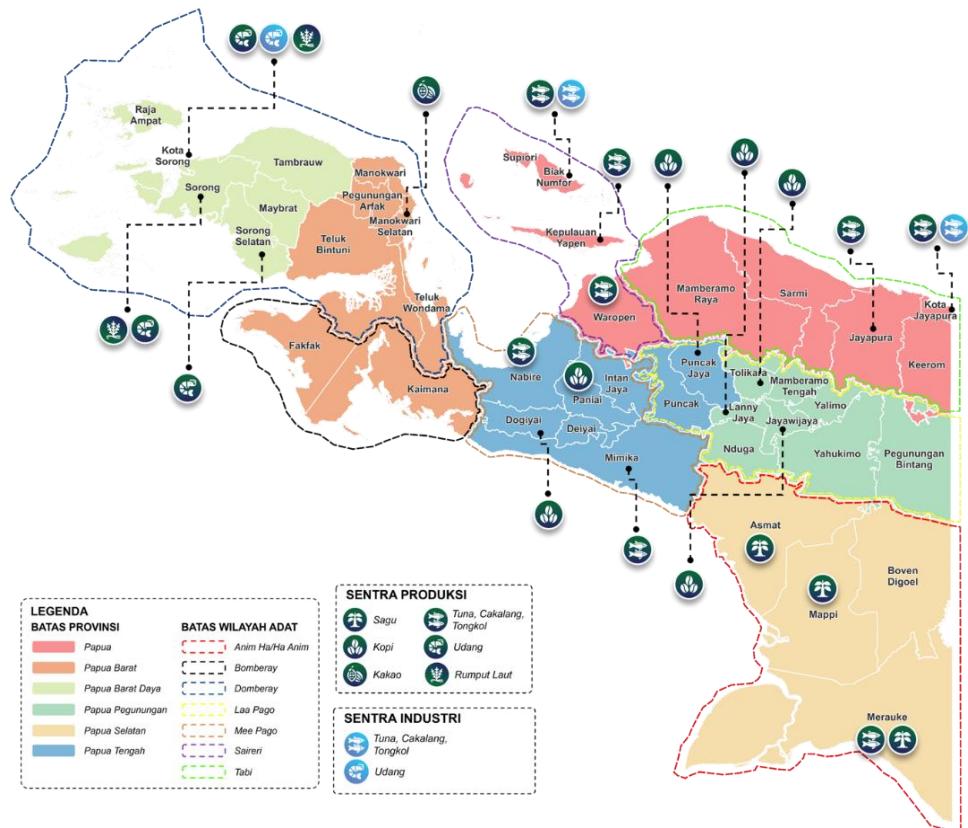
1.4.3.1 Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan

Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) penghasilan masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar; (2) terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan; (3) terbatasnya akses masyarakat dalam membuka/mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan (4) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan; (2) optimalisasi lahan pertanian dan penyaluran benih/bibit; (3) pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan perikanan, serta petani dan nelayan; (4) peningkatan kapasitas koperasi, UMKM, Industri Kecil dan

Menengah (IKM), dan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam fasilitasi usaha dan pemasaran produk; (5) peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mendukung ekonomi lokal; (6) pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengakses bantuan modal dan kemudahan berusaha; (7) penguatan kelembagaan kelompok dan korporasi petani dan nelayan; (8) peningkatan riset dan inovasi dalam mendukung pengembangan ekosistem komoditas unggulan; (9) fasilitasi sertifikasi ekspor dan penjaminan mutu; (10) pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); dan (11) penguatan logistik pertanian, serta sistem rantai dingin perikanan. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.11.

Gambar 1.11
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Unggulan Tahun 2025–2029

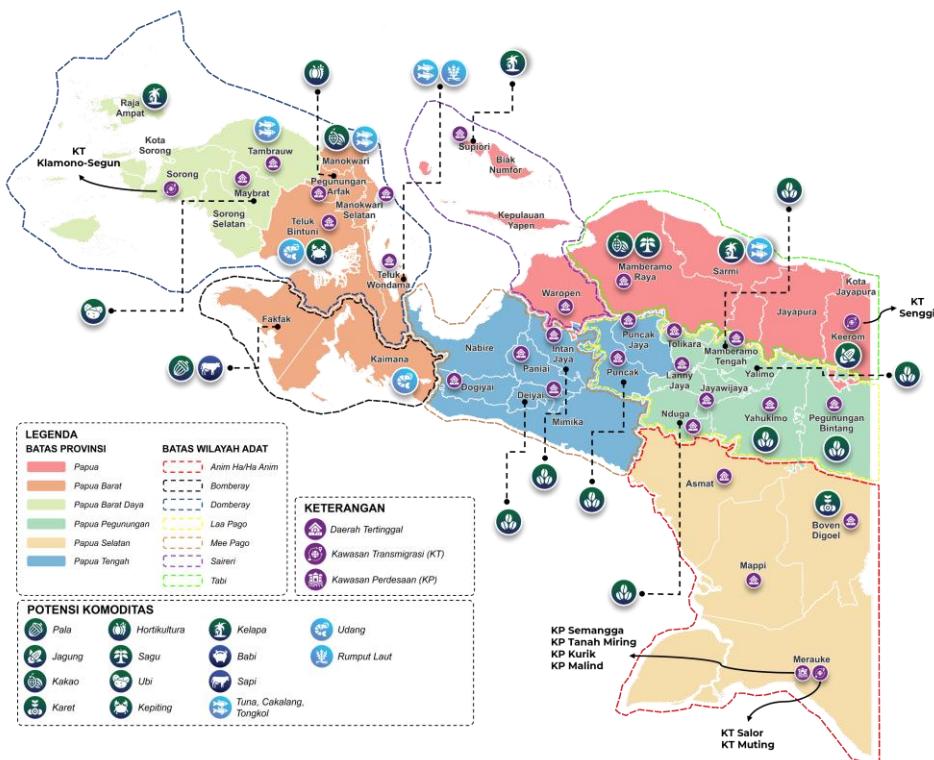


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Selain lokasi prioritas tersebut, Wilayah Papua memiliki beragam potensi pengembangan komoditas unggulan lainnya yang dapat dikembangkan melalui Dana

Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1.12.

Gambar 1.12
Potensi Pengembangan Komoditas Unggulan Lainnya



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.3.2 Program Percepatan Pengembangan Pariwisata Rintisan dan Ekonomi Kreatif

Program Percepatan Pengembangan Pariwisata Rintisan dan Ekonomi Kreatif merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) terbatasnya akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan; (2) terbatasnya akses masyarakat dalam membuka/mengembangkan UMKM; dan (3) belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal berbasis pariwisata.

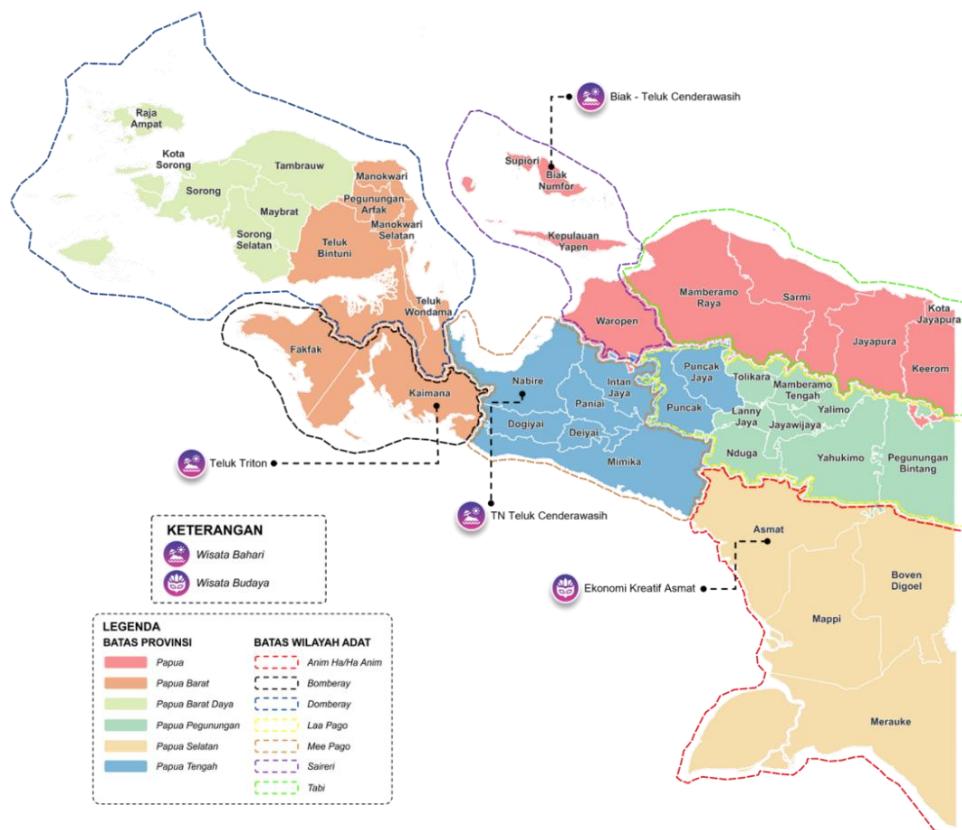
Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) penyediaan dan pengembangan atraksi, aktivitas, aksesibilitas, akomodasi,

dan amenitas dengan prinsip pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif; (2) pemberdayaan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif; (3) peningkatan kapasitas koperasi, UMKM, IKM, dan BUMKam dalam fasilitasi usaha dan pemasaran produk; (4) peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif; (5) pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengakses bantuan

modal dan kemudahan berusaha; (6) penguatan kelembagaan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif; dan (7) peningkatan promosi pariwisata dan ekonomi kreatif. *Highlight* indikasi lokasi prioritas

Program Percepatan Pengembangan Pariwisata Rintisan dan Ekonomi Kreatif pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.13.

Gambar 1.13
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Pengembangan Pariwisata Rintisan dan Ekonomi Kreatif Tahun 2025–2029

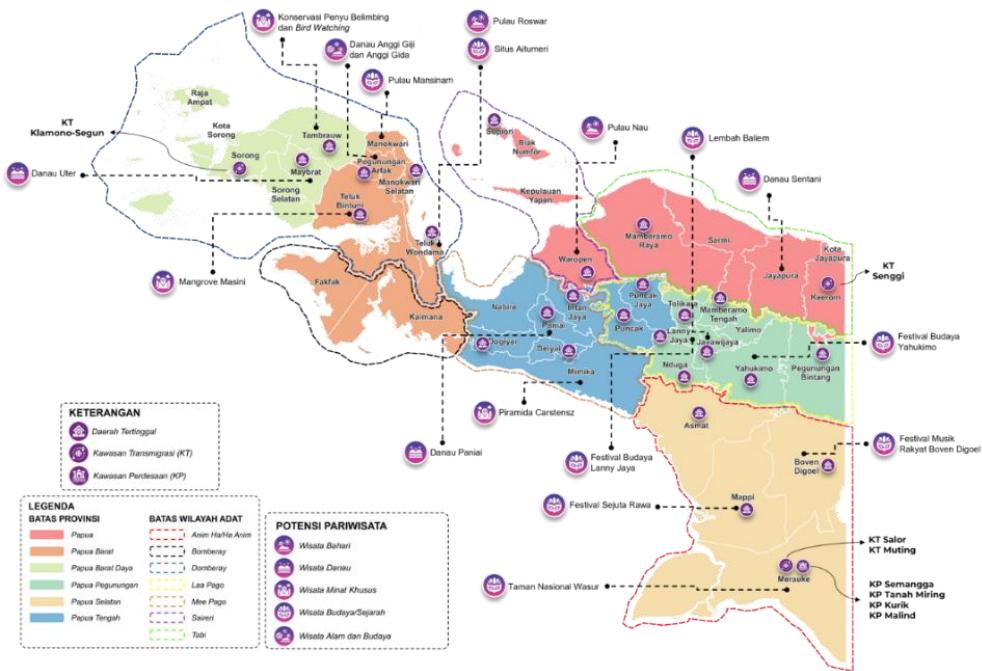


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

Selain lokasi prioritas tersebut, Wilayah Papua memiliki beragam potensi pengembangan pariwisata lainnya yang dapat

dikembangkan melalui Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana yang disajikan pada Gambar 1.14.

Gambar 1.14
Potensi Pengembangan Pariwisata Lainnya



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.3.3 Program Percepatan Swasembada Pangan

Program Percepatan Swasembada Pangan merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) penghasilan masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar; (2) minimnya ketersediaan makanan bergizi seimbang akibat belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal; dan (3) belum optimalnya pengembangan kawasan sentra produksi pangan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

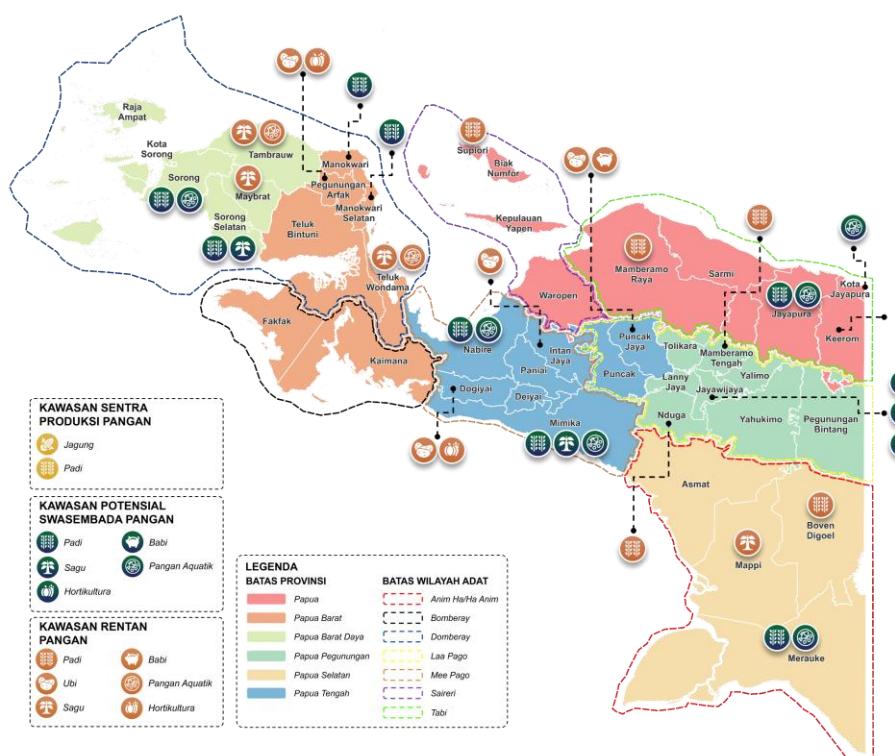
Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, perikanan,

dan peternakan; (2) optimalisasi lahan pertanian dan penyaluran benih/bibit; (3) pemberdayaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan, dan peternakan, serta petani, nelayan, dan peternak; (4) peningkatan program pelatihan vokasi dalam mendukung pengembangan kawasan swasembada pangan; (5) penguatan kelembagaan kelompok dan korporasi petani, nelayan, dan peternak; (6) peningkatan riset dan inovasi dalam mendukung pengembangan kawasan swasembada pangan; (7) pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); dan (8) penguatan logistik dan distribusi pangan.

Peningkatan swasembada pangan difokuskan baik pada daerah yang memiliki produksi pangan tinggi, maupun pada daerah yang rentan pangan. *Highlight* indikasi lokasi

Program Percepatan Swasembada Pangan pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.15.

Gambar 1.15
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Swasembada Pangan Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.3.4 Program Percepatan Peningkatan Investasi Kawasan

Program Percepatan Peningkatan Investasi Kawasan merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan belum optimalnya pengembangan kawasan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, yang disebabkan oleh: (1) rendahnya kepastian berusaha bagi pelaku usaha (kepastian lahan

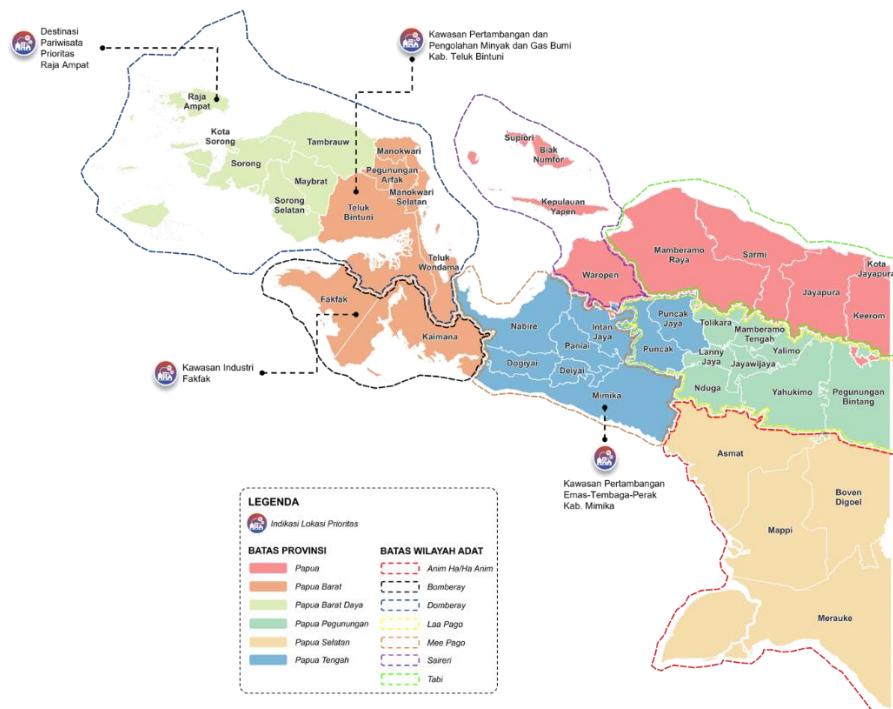
adat/ulayat dan non-adat/ulayat, kepastian regulasi, stabilitas keamanan, dan dukungan insentif); (2) tingginya biaya logistik yang disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan koneksiwilayah; (3) belum optimalnya dampak kawasan pusat-pusat pertumbuhan

terhadap perekonomian wilayah; dan (4) rendahnya tingkat pendidikan, kompetensi, dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) peningkatan kerja sama investasi; (2) fasilitasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha; (3) peningkatan sarana dan prasarana distribusi logistik dan perdagangan, termasuk simpul transportasi; (4) peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan pusat pertumbuhan; (5) fasilitasi pemasaran dan ekspor; (6) peningkatan program pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai kebutuhan dunia

usaha dan dunia industri (DUDI); (7) penataan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan dengan prinsip berkelanjutan; (8) pembinaan dan pendampingan utamanya kepada pelaku usaha lokal dalam pembentukan dan pengembangan wirausaha industri; dan (9) pemberian dukungan regulasi, stabilitas keamanan, dan insentif bagi pelaku usaha. Program ini akan berfokus pada peningkatan investasi pada kawasan-kawasan strategis yang berada di Wilayah Papua. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Peningkatan Investasi Kawasan pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.16.

Gambar 1.16
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
Peningkatan Investasi Kawasan Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

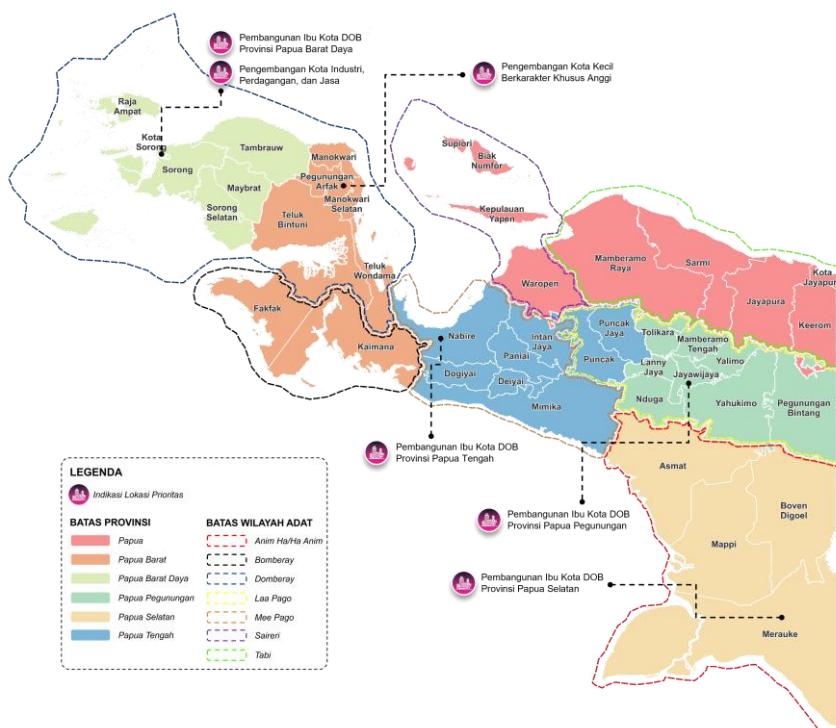
1.4.3.5 Program Percepatan Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berkelanjutan

Program Percepatan Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berkelanjutan merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan belum optimalnya pengembangan ibu kota daerah otonom baru dan kawasan perkotaan sebagai pusat pemerintahan, layanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) percepatan pembangunan sarana

dan prasarana pada kawasan pemerintahan di ibu kota DOB; (2) peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan; (3) penataan kawasan dan peningkatan citra kota; dan (4) peningkatan konektivitas intra dan antarwilayah, serta simpul transportasi. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Berkelanjutan pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.17.

Gambar 1.17
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
 Pembangunan Ibu Kota Daerah Otonom Baru dan Pengembangan Kawasan Perkotaan
 Berkelanjutan Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.4 Program Percepatan Prasyarat Pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif

Program percepatan prasyarat pembangunan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif pada RAPPP tahun 2025–2029 terdiri dari: (1) Program Percepatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah; (2) Program Percepatan Swasembada Air dan Energi; (3) Program Percepatan Peningkatan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim; (4) Program Percepatan Pembangunan Rendah Karbon dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (5) Program Percepatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan Publik; (6) Program Percepatan Penguatan Ketenteraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial; (7) Program

Percepatan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat; dan (8) Program Percepatan Penguatan Seni dan Budaya Lokal. Sebagai program percepatan prasyarat pembangunan, kedelapan program tersebut mendukung seluruh PHTC, khususnya PHTC 7, dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan, peningkatan ketahanan energi dan air, peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan pelayanan publik, penguatan seni dan budaya lokal, serta pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.

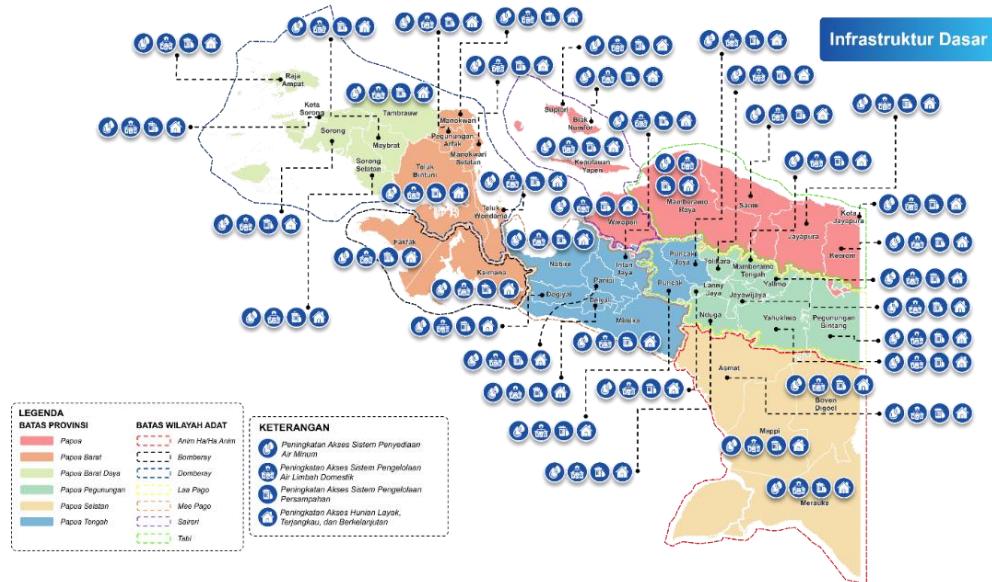
1.4.4.1 Program Percepatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah

Program percepatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) minimnya ketersediaan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan aman, hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, serta sistem pengelolaan persampahan; (2) sulitnya mengakses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan akibat belum optimalnya sarana dan prasarana transportasi antarkampung dan antarwilayah; (3) belum meratanya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan telekomunikasi untuk mendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kegiatan ekonomi; dan (4) tingginya biaya logistik yang disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah.

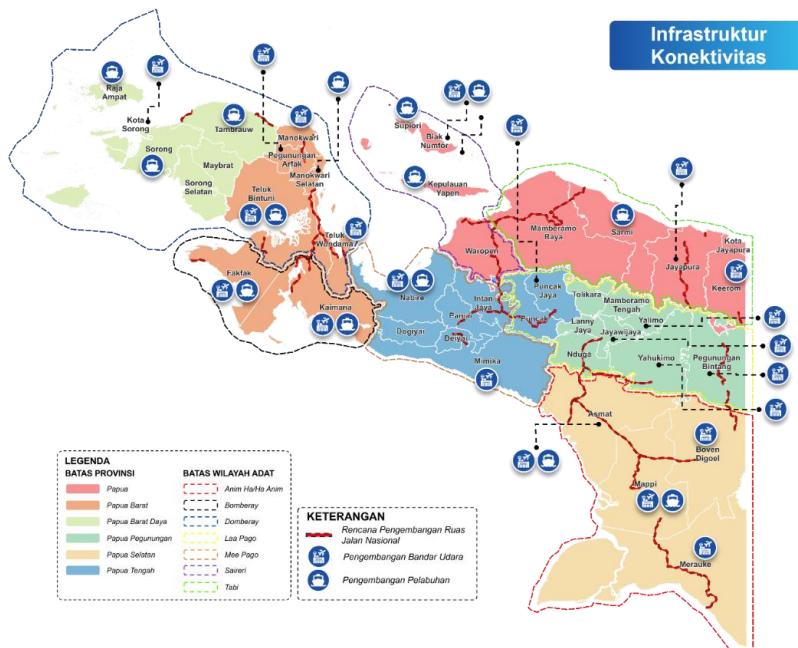
Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak dan aman, hunian layak,

terjangkau, dan berkelanjutan, serta peningkatan sistem pengelolaan persampahan; (2) pembangunan dan peningkatan jalan yang terintegrasi dengan simpul transportasi, pusat permukiman, pusat ekonomi, dan fasilitas layanan dasar; (3) penyediaan sarana dan prasarana serta layanan keperintisan angkutan jalan dan penyeberangan yang terintegrasi dengan program subsidi angkutan laut dan udara; (4) penyediaan angkutan barang dan penumpang yang terjadwal, terutama untuk distribusi logistik yang aman; (5) pengembangan integrasi layanan transportasi multimoda; (6) perluasan jaringan listrik dan peningkatan pasokan tenaga listrik; dan (7) perluasan jaringan telekomunikasi dan akses internet cepat hingga ke tingkat kampung. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Peningkatan Infrastruktur Wilayah pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.18.

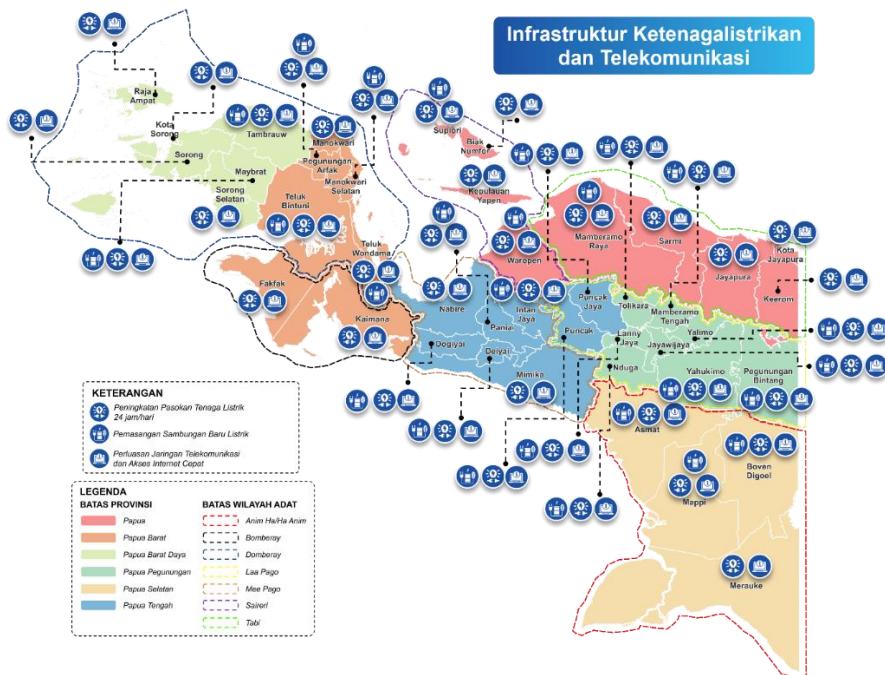
Gambar 1.18
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
Peningkatan Infrastruktur Wilayah Tahun 2025–2029



(a) Infrastruktur Dasar



(b) Infrastruktur Konektivitas



(c) Infrastruktur Ketenagalistrikan dan Telekomunikasi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

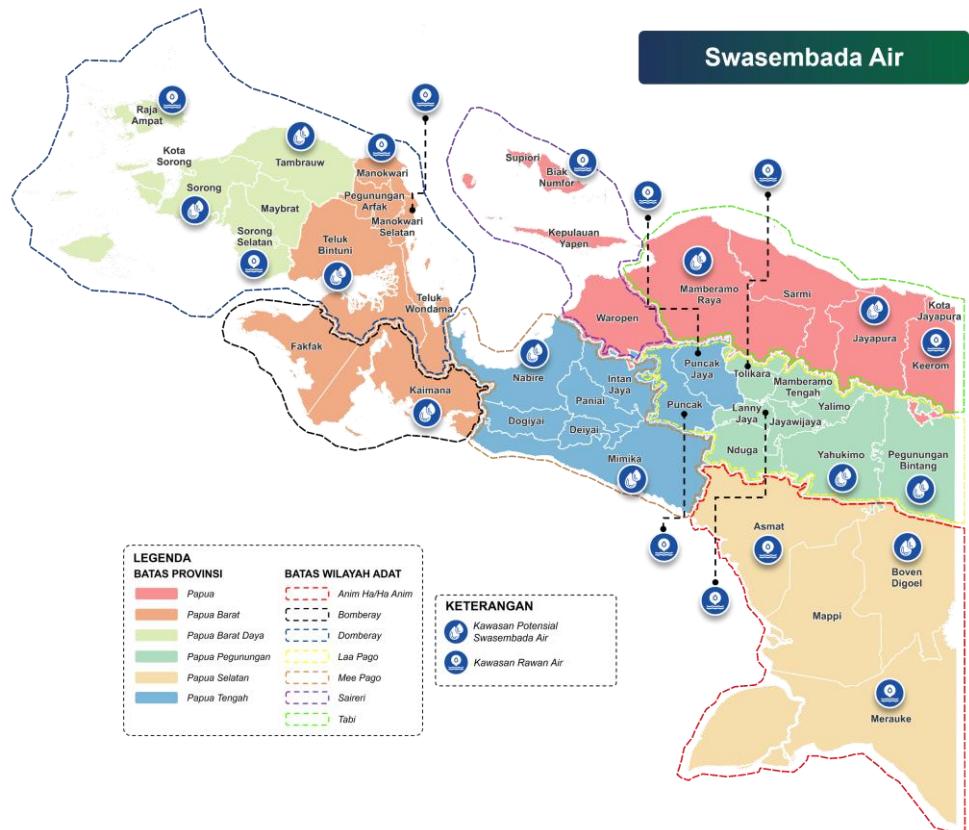
1.4.4.2 Program Percepatan Swasembada Air dan Energi

Program Percepatan Swasembada Air dan Energi merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan belum terpenuhinya kebutuhan air dan energi secara andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

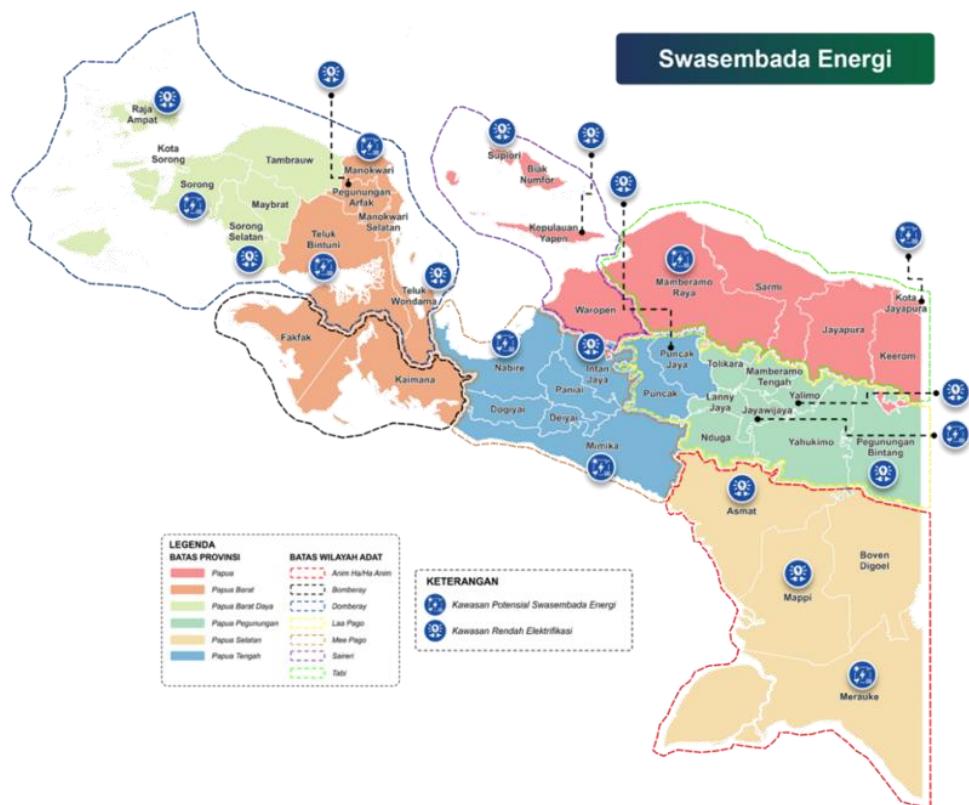
Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) pembangunan dan pengelolaan sumber air; (2) penyediaan pasokan air berkelanjutan; (3) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi; dan (4) peningkatan implementasi transisi energi dan diversifikasi energi. Peningkatan

swasembada air difokuskan baik pada daerah yang memiliki potensi sumber daya air tinggi, maupun pada daerah yang rawan air. Hal yang sama juga berlaku pada peningkatan swasembada energi yang difokuskan baik pada daerah yang memiliki potensi energi tinggi (terutama energi baru terbarukan), maupun pada daerah yang rendah elektrifikasi. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Swasembada Air dan Energi pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.19.

Gambar 1.19
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
Swasembada Air dan Energi Tahun 2025–2029



(a) Kawasan Swasembada Air



(b) Kawasan Swasembada Energi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.4.3 Program Percepatan Peningkatan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Program Percepatan Peningkatan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) rendahnya produktivitas komoditas unggulan akibat tingginya potensi gagal panen dan rendahnya hasil tangkap perikanan sebagai dampak perubahan iklim; (2) tingginya perkembangbiakan nyamuk malaria akibat pengaruh kondisi iklim; dan (3) rendahnya upaya mitigasi bencana terhadap risiko bencana yang tinggi.

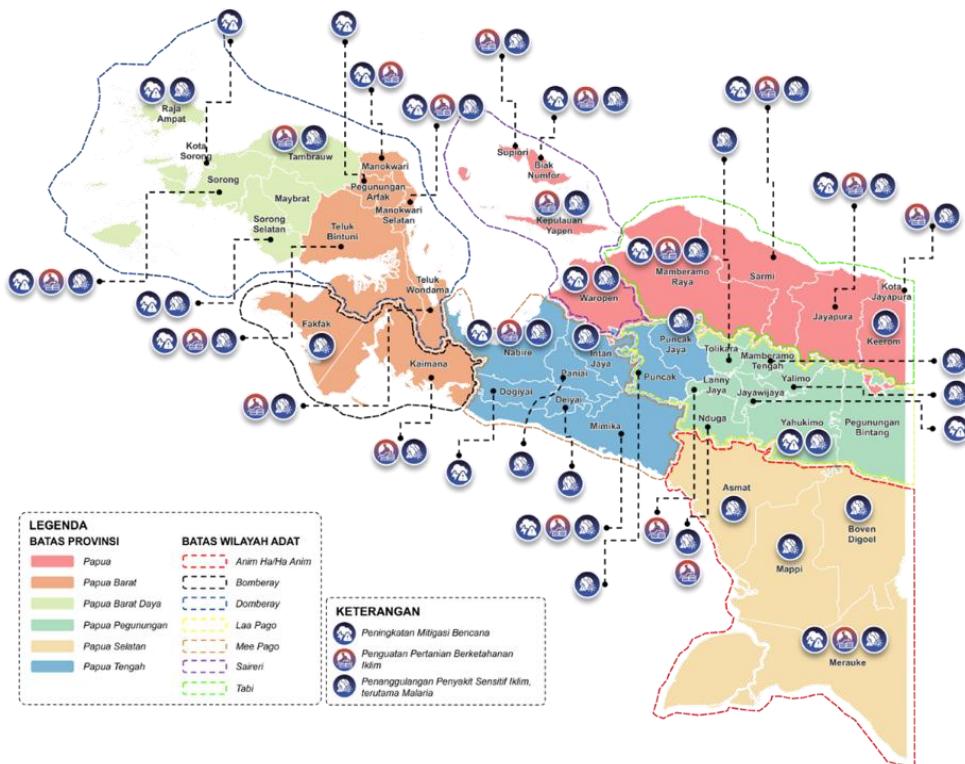
Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) peningkatan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi terkait mitigasi bencana dan perubahan iklim; (2) pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan teknologi yang tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim; (3) penyediaan sarana dan prasarana sistem peringatan dini bencana; (4) perancangan rekayasa lingkungan untuk menanggulangi penyakit sensitif iklim, terutama malaria; dan (5) perencanaan tata ruang yang

mempertimbangkan aspek kebencanaan. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Peningkatan Resiliensi Bencana dan

Perubahan Iklim pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.20.

Gambar 1.20

Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Peningkatan Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.4.4 Program Percepatan Pembangunan Rendah Karbon dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Percepatan Pembangunan Rendah Karbon dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) belum optimalnya pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan lingkungan hidup; dan

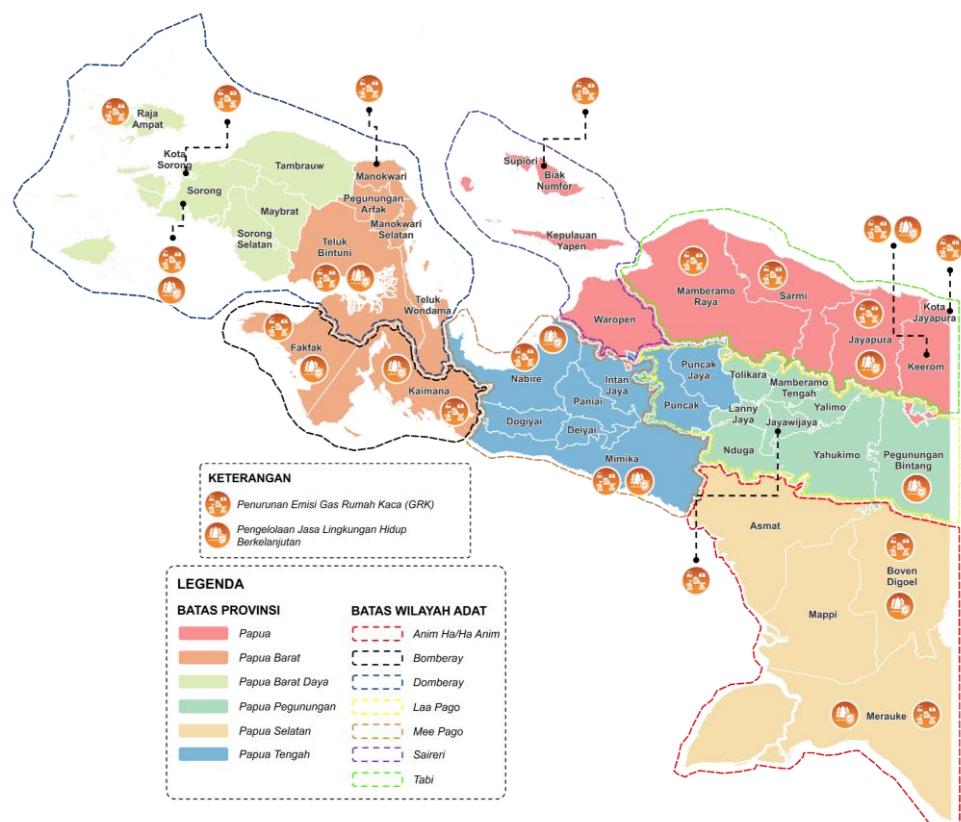
(2) belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon dalam mendukung target emisi nol bersih (*net zero emission*); (2)

percepatan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK); (3) pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan jasa lingkungan; dan (4) pemanfaatan nilai ekonomi karbon. Program ini akan difokuskan pada sektor-sektor penghasil emisi gas rumah kaca (GRK), yaitu sektor industri, energi, transportasi, pertanian dan lahan, serta persampahan. Selain itu, program ini juga berfokus pada upaya pengelolaan

lingkungan hidup seperti peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, dan perlindungan hutan sebagai penyimpan karbon, khususnya pada daerah dengan luas deforestasi yang relatif tinggi. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Pembangunan Rendah Karbon pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.21.

Gambar 1.21
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Pembangunan Rendah Karbon dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

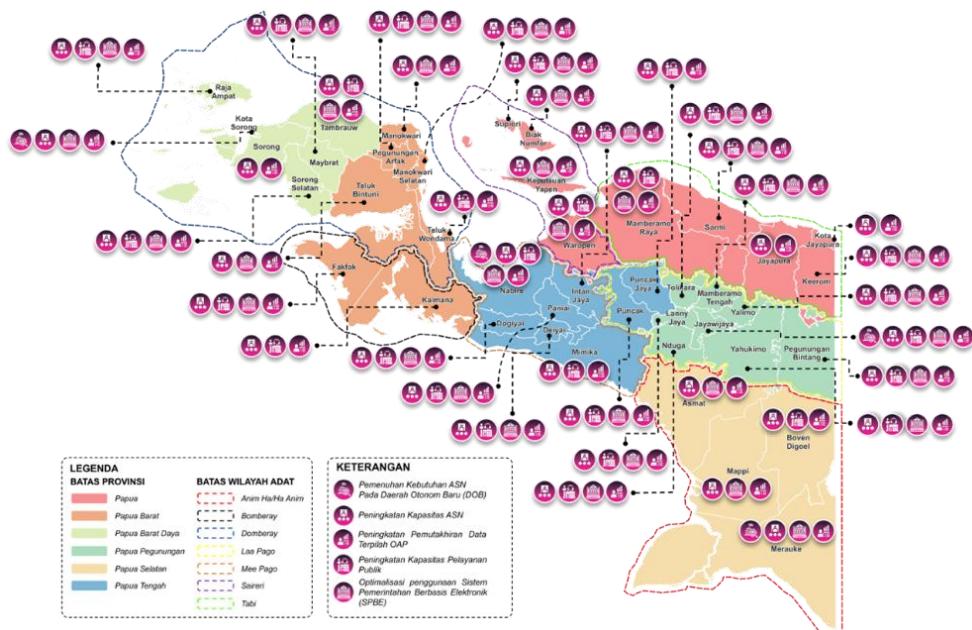
1.4.4.5 Program Percepatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan Publik

Program Percepatan Peningkatan Kapasitas ASN dan Pelayanan Publik merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan: (1) belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemerintahan; (2) belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas secara merata; (3) belum optimalnya implementasi teknologi informasi pada tata kelola pembangunan daerah; dan (4) masih minimnya data terpilah Orang Asli Papua (OAP) dan non OAP sebagai basis data dalam perencanaan pembangunan.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) pemetaan serta pemenuhan

kebutuhan ASN pada Daerah Otonom Baru (DOB); (2) pengembangan kompetensi dan manajemen kinerja ASN; (3) peningkatan kualitas dan perluasan akses dalam penyelenggaraan pelayanan publik; (4) penguatan kelembagaan siber dan ekosistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan (5) peningkatan dan pemutakhiran data terpisah Orang Asli Papua (OAP). *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pelayanan Publik pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.22.

Gambar 1.22
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

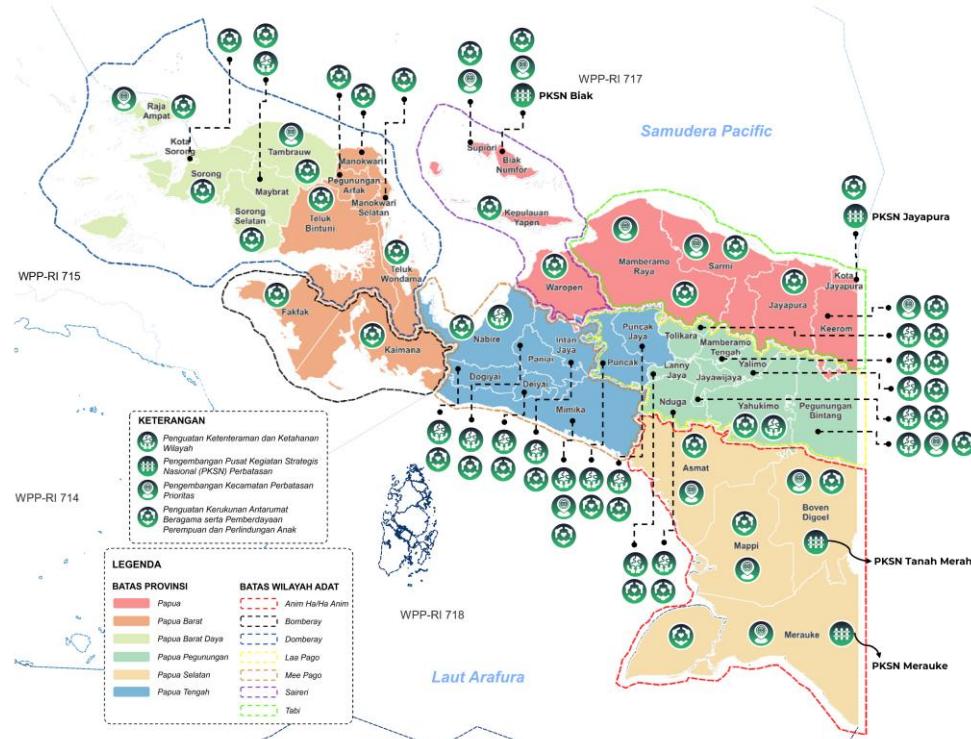
1.4.4.6 Program Percepatan Penguatan Ketenteraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial

Program Percepatan Penguatan Ketenteraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan belum kondusifnya tingkat keamanan dan stabilitas lingkungan di beberapa wilayah, yang berdampak pada terhambatnya upaya meningkatkan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) peningkatan peran aktif tokoh adat, agama, perempuan, dan masyarakat dalam pembangunan melalui pendekatan dialog; (2) peningkatan keamanan dan ketertiban umum; (3) peningkatan stabilitas dan

lingkungan yang kondusif; (4) penguatan kerukunan antarumat beragama; (5) peningkatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak; (6) penguatan komunikasi publik terpadu; dan (7) penguatan pertahanan dan keamanan, pemenuhan layanan dasar, serta pengembangan ekonomi lokal di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan kecamatan perbatasan prioritas. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Penguatan Ketenteraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.23.

Gambar 1.23
*Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
Penguatan Ketenteraman dan Ketahanan Wilayah serta Harmoni Sosial Tahun 2025–2029*



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

1.4.4.7 Program Percepatan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Program Percepatan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan belum optimalnya pengembangan kawasan pusat perekonomian dan pelayanan dasar, yang salah satunya disebabkan oleh ketidakpastian kepemilikan lahan adat/ulayat.

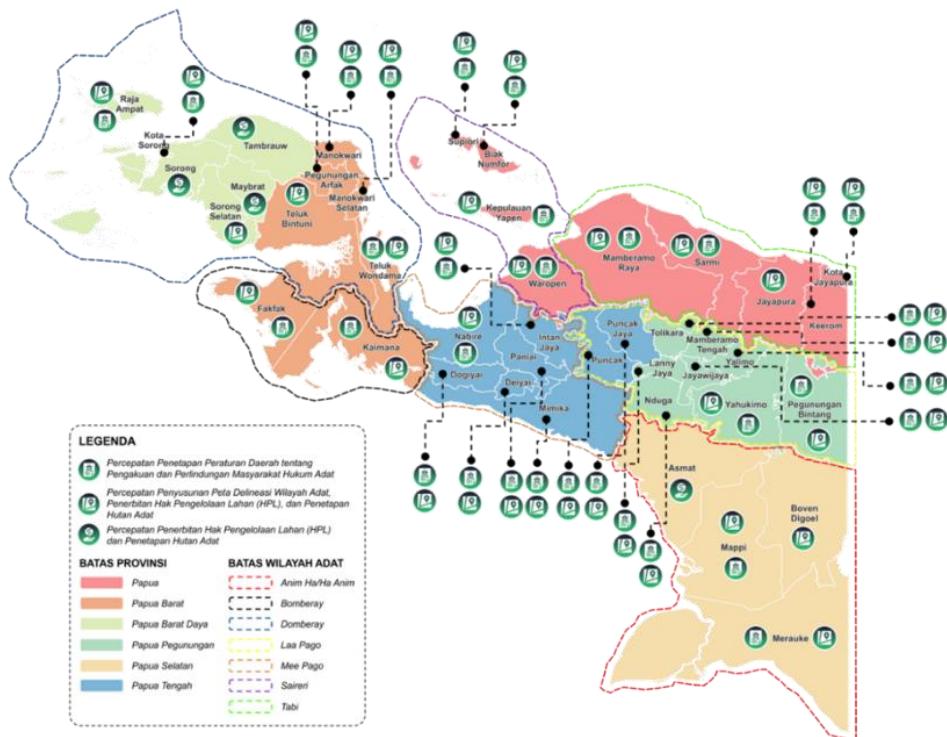
Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) inventarisasi dan identifikasi masyarakat hukum adat serta tanah

adat/ulayat dan hutan adat; (2) penyelesaian sengketa tanah adat/ulayat dan hutan adat; (3) penyusunan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, yang dilengkapi dengan peta delineasi tanah adat/ulayat dan hutan adat; (4) peningkatan administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah adat/ulayat dan hutan adat; dan (5) pemberdayaan masyarakat hukum adat dan komunitas adat terpencil.

Secara spesifik, program ini akan berfokus pada percepatan penetapan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; serta penyusunan peta delineasi wilayah adat, penerbitan hak

pengelolaan lahan (HPL), dan penetapan hutan adat. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.24.

Gambar 1.24
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)

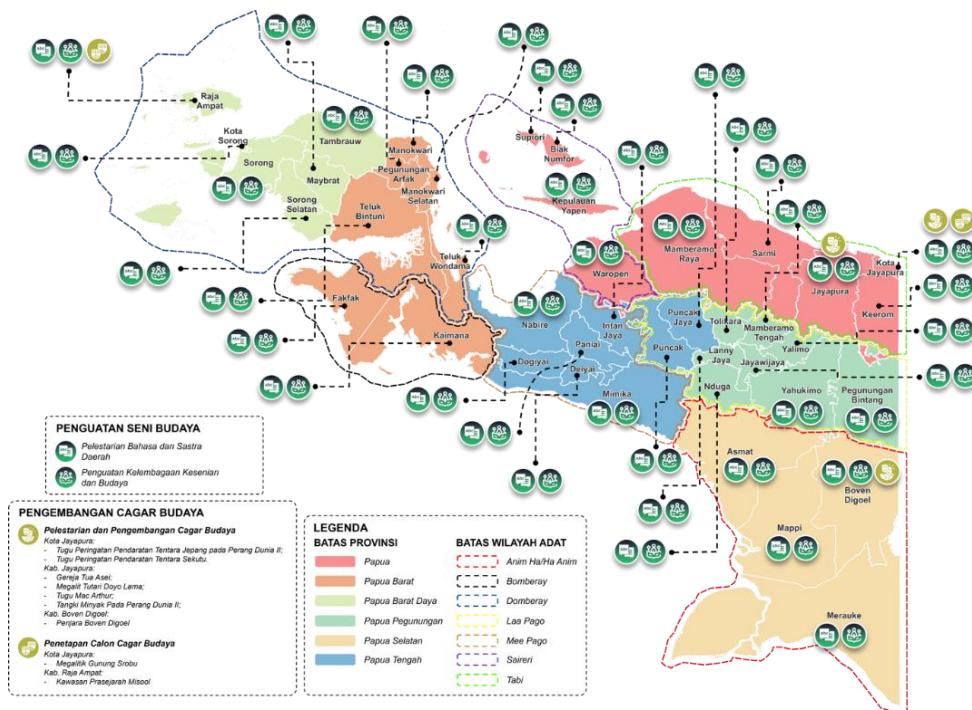
1.4.4.8 Program Percepatan Penguatan Seni dan Budaya Lokal

Program Percepatan Penguatan Seni dan Budaya Lokal merupakan upaya untuk menjawab tantangan pembangunan kurangnya kesadaran dan apresiasi terhadap seni dan budaya lokal, yang berdampak pada pudarnya seni dan budaya lokal karena minimnya regenerasi pada generasi muda.

Untuk itu, program ini akan menitikberatkan pada: (1) penguatan kelembagaan seni dan

budaya lokal; (2) pelestarian bahasa dan sastra daerah; (3) pelestarian dan pengembangan cagar budaya; (4) serta promosi seni dan budaya lokal. *Highlight* indikasi lokasi Program Percepatan Penguatan Seni dan Budaya Lokal pada RAPPP tahun 2025–2029 disajikan pada Gambar 1.25.

Gambar 1.25
Highlight Indikasi Lokasi Program Percepatan
 Penguatan Seni dan Budaya Lokal Tahun 2025–2029



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2024)



Kementerian PPN/
Bappenas

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
2025